

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi positif merupakan studi lanjut dari teori akuntansi normatif karena teori akuntansi normatif gagal dalam menjelaskan fenomena praktik yang terjadi secara nyata. Teori akuntansi positif mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan teori akuntansi. Teori akuntansi positif dapat memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan akuntansi dalam menentukan konsekuensi dari kebijakan tersebut (Utomo, 2013).

Teori Akuntansi Positif sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba, karena teori ini merupakan teori yang menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar

dapat dikomunikasikan kepada pihak lain didalam perusahaan. Menurut Watt and Zimmerman (1986), dalam teori akuntansi positif terdapat 3 hipotesis yang dapat menjadi sumber acuan dalam menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa manajemen laba dalam akuntansi, yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan utilitasnya salah satunya yaitu dengan bonus yang tinggi. Cara ini dilakukan dengan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi dalam laporan keuangan sehingga kompensasi yang diperoleh manajer dapat lebih maksimal.

b. Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Manajer perusahaan yang mendekati pelanggaran atas kesepakatan hutang akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Perusahaan yang mempunyai *leverage* (rasio hutang atas modal) yang tinggi akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba tahun depan ke tahun sekarang sehingga tingkat *leverage* kecil dan dapat menurunkan *default technic*. Hal ini dilakukan karena perjanjian hutang memiliki persyaratan bagi perusahaan sebagai pihak peminjam untuk mempertahankan *leverage* selama masa perjanjian.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar biaya politik yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laba tahun sekarang ke laba tahun depan. Dengan adanya biaya politik yang lebih besar maka akan membagi kemakmuran perusahaan kepada lebih banyak pihak, maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya politik yang akan dikenakan oleh pemerintah.

Teori akuntansi positif menggunakan perspektif ekonomi untuk menjelaskan tentang perilaku manajemen dalam pemilihan kebijakan akuntansi (Mangos dan Lewis 1995). Asumsi ekonomi dalam teori akuntansi positif membuat kerangka pikir menjadi terlalu sempit. Asumsi ini menghalangi para peneliti terdahulu untuk memperluas penelitian dan konteks penelitian yang lebih kompleks. Mangos dan Lewis (1995) mengkritik asumsi ekonomi murni sebagai dasar penjelasan perilaku dalam pemilihan metode akuntansi. Teori akuntansi positif mengungkapkan bahwa manajer mempunyai kuasa atau fleksibilitas untuk memilih prosedur akuntansi yang sesuai dengan prosedur pilihannya. Hal ini menjadikan manajer bisa memilih prosedur yang dapat meningkatkan laba ataupun menurunkan laba untuk memodifikasi laporan keuangan, ataupun untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Tindakan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan ini biasanya disebut sebagai manajemen laba.

Pada awal perkembangannya, teori akuntansi menghasilkan teori *normative* yang didefinisikan sebagai teori yang mengharuskan dan menggunakan kebijakan nilai (*value judgement*) yang mengandung minimum sebuah premis (Wolk dan Tearney, 1997 dalam Indira, 2004). Teori normatif pada awalnya belum menggunakan pendekatan investigasi formal, baru pada perkembangan berikutnya mulai digunakannya pendekatan investigasi terstruktur formal, yaitu pendekatan deduktif (dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dengan dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi (Anis dan Imam, 2003)).

Teori akuntansi positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Indira, 2004):

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.

3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam system perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.
4. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2000) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*). Jadi, tindakan oportunistik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep manajemen laba dapat dimulai dari pendekatan teori agensi (*agency theory*). Menurut Jansen dan Meckling (1976) dan Herdawati (2015) dalam Wahyuningtyas (2017), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen

(*agent*) dengan investor (*prinsipal*). Teori keagenan (*agency theory*) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Teori keagenan merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi kontrol (manajemen) dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham). Teori keagenan terfokus pada hubungan antara dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu antar prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajer). Konflik kepentingan dalam perusahaan yang terjadi antara prinsipal dengan agen disebut *agency conflict* disebabkan adanya hubungan keagenan atau *agensrelationship*.

agency conflict antara manajer dengan pemegang saham dapat terjadi terutama jika perusahaan memiliki *excesscash flow* tersebut oleh manajer kecenderungannya akan digunakan untuk meningkatkan kekuasaannya melalui investasi yang berlebihan dan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan atau *excessive perquisites*, Sartono (2001) dan Aryaningtyas (2009) dalam Tundjung (2015). *Agency conflict* dapat diminimalisir dengan mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, Taswan (2003) dan Aryaningtyas (2009) dalam Tundjung (2015).

3. Manajemen Laba

1. Pengertian Manajemen Laba

Menurut Subramanyam (2005:120) manajemen laba dapat **didefinisikan** sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi”.

Belkoui dalam Achmad Daengs (2014:201) menyatakan :

“*Earnings management* adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu contoh yang mencolok dari akuntansi yang dirancang”.

Menurut Ilham Fahmi (2013:279) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut :

“*Earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya”.

Gumanti (2004) menyatakan bahwa manajemen laba senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk “memanaje” pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang

dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Dari pengertian inilah yang melandasi Gumanti untuk melakukan penelitian terhadap *Earnings Management*: Suatu telaah pustaka. Pengertian ini didasari dari Schipper (1989:92) bahwa manajemen laba adalah:

“Disclosure management in the sense of purposeful intervention in the external reporting process, with intent of obtaining some private gain”.

Menurut Charles W. Mulford & Eugene E. Comiskey yang dialih Olla Saparini Harahap (2010:81) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut : “manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperoleh tujuan tertentu.

Pada dasarnya, definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi (Belkaoui, 2007:201).

Menurut Sulistyanto (2014), beberapa definisi-definisi manajemen laba meskipun menggunakan terminologi yang berbeda

namun secara garis besar definisi- definisi itu mempunyai pengertian yang serupa, yaitu sebagai berikut:

1. Davidson, Stickney, dan Weil (1987)

“Earning management is the process of taking deliberate steps within the contours of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earning”.

Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

2. Scipper (1989)

“earning management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain (apposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process)”.

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).

3. National Association of Certified Fraud Examiners (1993)

“Earning management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material fact, or accounting data, which is misleading and

when considered with all the information made available, would cause the reader to change or alter his or judgement or decision”.

Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atas keputusannya.

4. Fisher dan Rosenzweig (1995)

“Earning management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) i long-term economic profitability of the unit “.

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

5. Lewitt (1998)

“Management laba is flexibility in accounting allows is to keep pace with business innovations. Abuses such as earning occur when people exploit this pliancy. Trickery is employed to obscure actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions”.

Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua karena menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer.

6. Healy dan Wahlen (1999)

“Earning management occurs when managers uses judgment in financial reporting and in structuring transaction to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on the reported accounting numbers”.

Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang laporkan itu.

Menurut Ahmed dan Belkaoui (2000) dan Handayani dan Rachadi (2009) dalam Tundjung (2015) menyatakan bahwa informasi laba penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan alasan, yaitu:

1. Laba menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan deviden.

2. Laba merupakan dasar dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan perusahaan.
3. Laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi dan pembuat keputusan ekonomi.
4. Laba diyakini sebagai saran prediksi yang membantu dalam memprediksi laba dan kejadian ekonomi di masa mendatang.
5. Laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja manajemen.

Sedangkan menurut teori keagenan manajemen laba dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara principal (pemilik perusahaan) dan agen (pengelola). Hal ini terjadi karena manajer (pengelola) mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemegang saham dan mempergunakannya untuk meningkatkan utilitasnya.

Didasarkan dari berbagai definisi pengelolaan laba tersebut, beberapa karakteristik tentang pengelolaan laba yaitu: (1) dilakukan dengan mendasarkan pada proses dimensi waktu; (2) sebagai pilihan terhadap kebijakan akuntansi perusahaan untuk tujuan pelaporan keuangan; (3) ada aspek perilaku manajer yang mengelola laba (*earnings*) dengan berbagai motif, misalnya mengambil keuntungan dengan adanya asimetri informasi atau untuk menyembunyikan kinerja yang buruk (Sutrisno,2010).

4. Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management*. Menurut Ilham Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu :

1. Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetris informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara *agent* dan *parsial*. *Agent* adalah manajemen perusahaan (internal) dan *parsial* adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan tetapi juga termasuk kreditor, pemerintah dan lainnya.

5. Motivasi Manajemen Laba

Scott (2003) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba :

1. *Bonus Purposes*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

2. Kontrak Utang Jangka Panjang

Semakin dekat perusahaan dengan perjanjian kredit, maka manajer akan cenderung memilih prosedur yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam pelunasan hutang.

3. *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

5. *Pergantian CEO*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Menurut Subramanyam (2005:121-122), banyak alasan yang melakukan manajemen laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah. Insentif manajemen laba dibahas sebagai berikut:

1. Insentif perpajakan

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi.

Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus

berdasarkan laba. Perjanjian bonus memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus lebih tinggi dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan.

2. Dampak Harga saham

Insentif manajemen laba lainnya adalah potensi dampak terhadap harga saham. Misalnya, manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti *merger* yang dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana untuk menjual saham atau melaksanakan opsi. Manajer juga melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan risiko dan menurunkan biaya modal. Salah satu intensif manajemen laba yang terkait lainnya adalah untuk melampaui ekspektasi pasar. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara yaitu manajer menurunkan ekspektasi pasar melalui pengungkapan sukarela yang pesimis

(sebelum pengumuman) dan kemudian meningkatkan laba untuk melampaui ekpektasi pasar.

3. Insentif lain

Terdapat beberapa alasan melakukan manajemen lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Laba sering kali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoli dan IRS.
- b. Perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi dan dan proteksi dari persaingan asing.
- c. Pemerintah juga menurunkan laba untuk mengelakkan permintaan serikat buruh.
- d. Salah satu insentif manajemen laba lain adalah perubahan manajemen.

Hal ini sering menyebabkan *bigh bath* karena beberapa alasan, yaitu : (1) melempar kesalahan pada manajer yang berwenang, (2) sebagai tanda bahwa manajer baru harus membuat keputusan tegas untuk memperbaiki perusahaan, (3) memberikan kemungkinan dilakukannya peningkatan laba dimasa depan.

6. Strategi Manajemen Laba

Menurut Subramanyam (2005:120-121) menyatakan bahwa beberapa strategi yang dapat digunakan melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut :

1. Manajer meningkatkan laba periode kini

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Perusahaan dapat melakukan manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan kemudian membalik akrual sekaligus pada saat pembebanan. Pembebanan saat ini sering kali dilaporkan “dibawah laba bersih” (*bellow the line*) sehingga dipandang tidak terlalu relevan.

2. Manajer melakukan “mandi besar” (*big bath*) melalui pengurangan laba periode kini.

Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (sering kali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang burrur) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger atau restrukturisasi. Strategi *big bath* juga juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

3. Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (*income smiithing*)

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Pemerataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba ini.

7. Metode Manajemen Laba

Semakin banyaknya manajer mendapatkan pelatihan tentang akuntansi, maka akan semakin mudah pula bagi manajer untuk melakukan praktik akuntansi yang digunakan untuk melakukan manajemen laba. Metode atau teknik umum yang digunakan dalam manajemen laba, Stice (2006) dan Herdawati (2015) dalam Wahyuningtyas (2017), yaitu:

1. Penentuan waktu yang tepat, yaitu dilakukan dengan mengatur transaksi yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan pada periode yang tepat atau menguntungkan. Pada metode ini, ketika terjadi kerugian yang besar atas suatu transaksi, maka dengan sengaja manajer akan mempercepat transaksi lainnya yang dapat memberikan keuntungan untuk menutup kerugian atas transaksi sebelumnya pada periode

- yang sama. Sebaliknya, apabila terdapat keuntungan yang besar atas suatu transaksi, maka dengan sengaja manajer akan mempercepat transaksi yang berpotensi merugikan.
2. Perubahan dalam metode atau estimasi akuntansi, yaitu dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi yang tidak secara tegas menyatakan metode atau estimasi yang harus diterapkan ataupun tidak boleh diterapkan. Adapun perubahan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba seperti, penilaian biaya persediaan dari LIFO ke FIFO pada periode inflasi. Menurunkan laba dapat dilakukan dengan mengubah metode penyusutan dari garis lurus ke saldo menurun ganda. Selain itu, perubahan estimasi akuntansi juga mengakibatkan naik turunnya laba. Contohnya untuk meningkatkan laba, dilakukan perpanjangan umur ekonomi aktiva tetap atau merendahkan persentase jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, sehingga jumlah yang dibebankan lebih rendah.
 3. Akuntansi tidak sesuai standar, yaitu metode manajemen laba dengan melakukan penyimpangan secara sengaja terhadap standar akuntansi. Teknik ini dapat dikategorikan sebagai kecurangan dalam pelaporan keuangan. contohnya melakukan kapitalisasi terhadap beban operasional perusahaan sehingga laba menjadibesar.
 4. Transaksi fiktif, yaitu metode manajemen laba yang memanipulasi informasi dengan mengakui transaksi yang sebenarnya tidak terjadi ataupun tidak mengakui transaksi yang telah terjadi. Hal ini juga

dapat dikategorikan sebagai kecurangan, misalnya mengakui penjualan fiktif atau menyembunyikan barang dagangan yang diretur untuk menghindari pengurangan penjualan.

8. Implikasi Manajemen Laba Terhadap Analisis Laporan Keuangan

Karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan, identifikasi dan membuat penyesuaian manajemen laba menjadi tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Sebelum menentukan apakah suatu perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analisis harus melakukan hal berikut ini:

- *Insentif melakukan manajemen laba.* Manajemen laba tidak dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Insentif ini telah dibahas sebelumnya dan seorang analisis harus mempertimbangkan insentif tersebut.
- *Reputasi dan masalah manajemen.* Perlu untuk menilai reputasi dan integritas manajemen. Membaca laporan keuangan periode lalu, persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media keuangan memberikan informasi yang berguna untuk masalah ini.
- *Pola yang konsisten.* Tujuan manajemen laba adalah memengaruhi angka paling bawah seperti laba atau rasio utama seperti *debt to equity* atau *interest coverage*. Perlu diverifikasi apakah komponen laba (neraca) tertentu telah diubah untuk tujuan tertentu.
- *Kesempatan melakukan manajemen laba.* Sifat aktivitas usaha menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Jika sifat

aktivitas usaha membutuhkan penilaian yang cukup banyak untuk menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar kesempatan untuk melakukan manajemen laba (Subramanyam, 2005:124).

9. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak didefinisikan oleh Soemitro dalam Resmi (2017 : 01), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara Djajadiningrat dalam Resmi(2017 : 01) mengemukakan bahwa, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sehingga dari uraian diatas dapat diartikan bahwa pajak merupakan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di indonesia.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara, khususnya pelaksanaan pembangunan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara demi mewujudkan kemandirian bangsa, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan pembangunan. Selain sebagai sumber dana bagi suatu negara, pajak juga sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat.

Penerapan pajak di Indonesia sendiri menganut *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan metode pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikatakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Suandy (2002 : 75). Sementara Mardiasmo (2009: 129) mengemukakan pajak

penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam waktu pajak berjalan. Pajak penghasilan ini bersifat subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak yang lainnya. Sementara pajak penghasilan menurut ketentuan pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak penghasilan untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2008 tersebut.

3. Pajak Tangguhan

1. Beban Pajak Tangguhan

Menurut Mochammad Zain (2008:187) pajak tangguhan terjadi akibat:

“perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis

penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer.”

Menurut PSAK 46 dalam Mohammad Zain (2008:70) mendefinisikan bahwa beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah: “jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode”.

Menurut Harnanto (2013:115), beban pajak tangguhan dapat diartikan:

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”.

Menurut PSAK No.46 dalam Waluyo (2012:272) “Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.”

Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat dikategorikan dalam dua kelompok :

1. Perbedaan Permanen atau Tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.

2. Perbedaan Temporer atau Waktu

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:

- a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
- b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi.

- d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia”.

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut :

- a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu *reversal* beda temporer tersebut.
- b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal *goodwill* yang berasal dari penggabungan usaha.
- c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

2. Penghitungan Dasar Pajak Tangguhan

Pada dasarnya bahwa PSAK No. 46 adalah cukup kompleks, karena untuk PSAK No. 46 secara utuh diperlukan juga pemahaman yang cukup atas UU PPh Indonesia. PSAK No. 46 mengatur mengenai tata cara pencatatan dan pengakuan atas pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan, dan bukan mengatur mengenai berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, maka untuk menghitung berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar adalah berdasarkan ketentuan dalam UU Perpajakan.

Menurut Purba, (2009:68) penghitungan dasar pajak tangguhan:

“Hutang PPh dihitung berdasarkan laba akuntansi kena pajak. Akan tetapi, perlu disadari bahwa jumlah PPh yang nyata-nyata harus dibayar sesungguhnya adalah PPh terutang yang dihitung

berdasarkan laba kena pajak, artinya biaya PPh bisa saja lebih kecil atau lebih besar dari hutang PPh. Untuk itu, diperlukan suatu penangguhan dari biaya PPh yang terlalu cepat diantisipasi atau biaya PPh yang ditunda pembayarannya. Karenanya, hutang PPh atau PPh yang harus dibayar/disetor pada negara, di hitung sebagai berikut:

Laba akuntansi sebelum pajak		xxxx
Beda waktu		
Biaya penyusutan	=	(xxx)
Beban imbalan pasca kerja	=	xxx
Jumlah beda waktu		xxxx
Beda tetap		
Pendapatan bunga	=	(xxx)
Beban jamuan	=	xxx
Jumlah beda tetap		_____ xxxx
Laba kena pajak		xxxx
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan		_____ xxxx
Laba kena pajak		xxxx

Apabila penyusutan fiskal lebih kecil daripada penyusutan komersial akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan laba komersial akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Besarnya pajak tangguhan dihitung dari besarnya penyusutan

beda waktu dikalikan tarif pajak tangguhan. Berdasarkan Undang-Undang N0.36 tahun 2008, tarif pajak tangguhan adalah 25%.

Purba (2009:44) menjelaskan lebih lanjut mengenai ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat kewajiban dan aktiva pajak tangguhan :

(Dr) Beban pajak tangguhan	xxx
(Cr) Kewajiban pajak tangguhan	xxx
(Dr) Aktiva pajak tangguhan	xxx
(Cr) Manfaat pajak tangguhan	xxx

Berdasarkan pada penghitungan pajak penghasilan di atas, maka secara khusus penyajian dari perkiraan aktiva atau kewajiban PPh ditangguhkan berdasarkan PSAK No 46. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar, maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

Variabel beban pajak tangguhan diukur dengan menganalisa perubahan yang terjadi atas aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan tahun berjalan (Yulianti, 2004).

$$BBPT = \frac{\text{beban pajak tangguhan } i \text{ pada tahun } t}{\text{Total aktiva pada akhir tahun } t - 1}$$

3. *Deferral Method* (**Metode Pajak Tangguhan**)

Menurut Kieso dan Weygant, (2010:76) *Deferred method* (Metode Penangguhan): “Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (income statement approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini lebih menekankan *matching principle* pada periode terjadinya perbedaan tersebut. Namun, perkembangan dunia bisnis dan akuntansi telah sedemikian pesatnya sehingga muncul transaksi-transaksi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi langsung diakui sebagai bagian dari ekuitas misalnya keuntungan atau kerugian dari surat berharga yang siap untuk dijual kapan saja. Apabila menggunakan pendekatan laba rugi transaksi seperti itu tidak dapat terdeteksi, sehingga pendekatan ini dipandang kurang relevan”.

Beban pajak tangguhan timbul sebagai akibat adanya perbedaan waktu antara laba akuntansi (komersial) dengan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dengan

laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya penyusunan dalam laporan keuangan standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan, Yulianti (2004) dalam Wijayanti (2016).

Beban pajak tangguhan merupakan salah satu akun yang muncul pada laporan laba rugi sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang memiliki koreksi negatif lebih besar dibandingkan dengan koreksi positif. Beban pajak tangguhan juga merupakan nilai dari perubahan yang terjadi atas aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan tahun berjalan. Beban pajak tangguhan akan naik seiring dengan meningkatnya kewajiban pajak tangguhan bersih. Kewajiban tangguhan bersih diperoleh dari selisih antara kewajiban pajak tangguhan dengan aktiva pajak tangguhan, Djamaluddin (2008) dalam Lestari (2012).

10. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh hutang dan ekuitas saja

tetapi ditentukan oleh presentase kepemilikan saham oleh manajemen dan instansi.

Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan adalah:

“Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principals*).”

Sedangkan menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan struktur kepemilikan adalah:

“Struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”

Struktur kepemilikan terbagi kedalam beberapa jenis. Adapun jenis-jenis struktur kepemilikan menurut **Jensen and Meckling (1976)** dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Instutional merupakan kepemilikan saham oleh pihak intitusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank perusahaan investasi dan kepemilikan intitusi lain. Kepemilikan intitusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara afektif.

Dengan tingkat kepemilikan intitusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dpat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan.

Menurut Nabela (2012:2) definisi kepemilikan intitusional adalah:

“Merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase”

Menurut Nuraina (2012:116) kepemilikan institusional adalah:

“Presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain”

Jadi dengan kata lain kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun.

Menurut Dewata *et al.* (2015), kepemilikan institusional dapat diukur berdasarkan rumus dibawah ini.

$$\text{RUMUS: } KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Jansen (1986) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini

kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Menurut Downes dan Goddman (2000) dalam Dwi Sukirni (2012),

kepemilikan manajerial yaitu :

“para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dan pemilik manajer secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan”.

Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan. Pengertian manajerial menurut (Diyah dan Emas, 2009) sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).”

Biasanya manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi tersebut. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa kinerja perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Jensen (1986) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer diperlukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlukan sebagai pemegang

saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Menurut Faizal (2011) bahwa pengertian kepemilikan manajerial adalah:

“tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam %”.

Jadi, dengan kata lain kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki manajer yang dinyatakan dalam % sehingga manajer sekaligus sebagai pemegang saham.

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Ni Putu (2012) kepemilikan manajerial adalah:

“para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Brigham et al (2009), dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang biasanya disebut *agency conflict*. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa :

- a. Pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen
- b. Pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan
- c. Biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut *managerial ownership*.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Putri (2012) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik dengan keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Ross et al (1999) dalam Noor Laila (2011) menyatakan bahwa: “dengan kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerja kepentingan untuk kepentingan pemegang saham dan kepentingan sendiri”.

Dari sudut pandang akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda, seperti antar manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham

dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria yaitu:

1. Perusahaan dipimpin oleh menager dan pemilik
2. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik

Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode yang mereka kelola. Persentase tertentu kepemilikan saham oleh manajemen cenderung mempengaruhi manajemen laba. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya.

Menurut Dwi Sukirni (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Menurut Akhmad Riduwan dan Enggar Fibria Verdana Sari (2013) Pengukuran kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sri Wijayanti (2016)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Persistensi Laba dan Manajemen Laba	Variabel independen (X): Beban pajak tangguhan Variabel dependen (Y): Persistensi laba dan manajemen laba Variabel control: penjualan	Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2.	Sumomba (2012)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Variabel independen (X): Beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak Variabel dependen (Y): manajemen laba	Tahun 2008, beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba. Tetapi pada tahun 2009, beban pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi adanya praktik manajemen laba
3.	Hamzah (2014)	Deteksi Manajemen Laba Melalui Beban Pajak Tangguhan, Akrua dan Arus Kas Operasi (Studi Pada	Variabel independen (X): Beban pajak tangguhan, komponen akrual, dan arus kas operasi Variabel	Beban pajak tangguhan berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba pada saat menghindari pelaporan penurunan

		Perusahaan <i>Real Estate</i> dan <i>Property</i> yang terdaftar di BEI)	dependen (Y): Manajemen laba	laba. AkruaI dan arus kas tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba pada saat menghindari pelaporan penurunan laba. Beban pajak tangguhan, akruaI dan arus kas tidak berpengaruh atau tidak signifikan dalam mendeteksi manajemen laba pada saat menghindari melaporkan kerugian.
4.	Retni Puji Lestari (2012)	Analisis Kemampuan Beban Pajak tangguhan dalam memprediksi manajemen laba	Variabel independen (X): Beban pajak Variabel dependen (y): manajemen laba	Variabel beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.
5.	Anjar wahyuningt yas (2017)	pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri	Variabel independen (X): Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan Variabel dependen (Y): manajemen laba	Perencanaan beban pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Perencanaan

		barang konsumsi yang terdaftar di bea cukai tahun 2012-2015		pajak dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba sebesar 7,3%, sisanya sebesar 92,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
6.	Yulianti (2005)	Kemampuan pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba	Variabel independen (X): pajak tangguhan Variabel dependen (Y): manajemen laba	Beban pajak tangguhan memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap manajemen laba.
7.	Restu Agusti dan Tyas Pramesti (2008)	Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba	Variabel independen (X): Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Variabel Dependen (Y): Manajemen Laba	Kepemilikan Manajerial Berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007.
8.	Gede dan Dharma (2017)	Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Variabel independen (X): perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan Variabel dependen	Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Beban pajak penghasilan memiliki pengaruh

			(Y): manajemen laba	positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba
9.	Yana Ulfah (2014)	Analisis beban pajak tangguhan dan beban pajak kini untuk mendeteksi manajemen laba	Variabel independen (X): Beban pajak tangguhan dan beban pajak kini Variabel dependen (Y): Manajemen laba	Bahwa Beban pajak tangguhan dan beban pajak kini memiliki pengaruh positif dalam mendeteksi manajemen laba.
10.	Budiman (2013)	Pengaruh beban pajak tangguhan dan akrual terhadap indikasi adanya praktik manajemen laba	Variabel independen (X): Beban Pajak Tangguhan, Akrual Variabel dependen (Y): Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba, akrual berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba

Sumber: Diolah Penulis

C. Pengembangan Hipotesis

1. Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Keberadaan pajak sebenarnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara, selain itu akuntansi juga merupakan sistem pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan. Halim (2005) mengatakan bahwa secara spesifik sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, sebaliknya sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan diharapkan dapat mengatasi asimetris informasi (teori keagenan) yang mungkin terjadi antara manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan keuangan sebagai pihak eksternal.

Harnanto (2011) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak (Yulianti, 2005).

Yulianti (2004) menambahkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusutan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. *Signalling theory* menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Penjelasan lain yang dapat mendukung pernyataan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba yaitu dengan cara melihat hasil koreksi fiskal berupa koreksi negatif. Koreksi negatif adalah kondisi di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial. Hal inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan kewajiban pajak tangguhan pada pos neraca periode berjalan dan periode berikutnya diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Hasil penelitian yang dilakukan Yulianti (2005 dalam Wijayanti 2016) menemukan bukti empiris bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan probabilitas perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna menghindari kerugian

perusahaan. Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk mereayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh menurun dengan demikian peluang yang lebih besar untuk mendapatkan laba lebih besar dimasa yang akan datang dan mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Kemilikan Manajerial Memperkuat Hubungan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Jensen dan Meckeling (1976), kepentingan pemilik atas pemegang saham akan dapat disejajar akan dengan kepemilikan manajer dengan cara memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham. Pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan dalam perusahaan dapat memicu timbulnya konflik agensi dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial ini akan mampu menyetarakan kepentingan antara manajemen (*insider*) dengan

pemegang saham Jensen and Meckling (1976). Semakin meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen, maka akan menyebabkan manajemen lebih berhati-hati menggunakan utang karena mereka ikut menanggung risiko yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, yang berarti pihak manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham atas perusahaan yang dikelolanya. Oleh sebab itu pihak manajemen juga bertindak sebagai pemegang saham perusahaannya sendiri, maka dapat diperkirakan manajer akan mengambil langkah yang sejalan dengan apa yang diinginkan sebagai pemegang saham, yaitu ingin merasakan manfaat dari setiap keputusan yang diambil.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara menggeser pendapatan masa depan (*future earnings*) menjadi pendapatan sekarang (*current earning*) dan biaya sekarang (*future cost*), sehingga laba yang bersangkutan menjadi lebih tinggi dari nilai sebenarnya dan tidak mencerminkan nilai fundamental perusahaan yang sebenarnya (Healy dan Wahlen 1989 dalam Suyudi, 2009). Salah satu cara yang dapat ditempuh manajer adalah melakukan manajemen laba dengan rekayasa akrual (Iqbal Bayu Septiansyah, 2010:44). Sedangkan informasi yang digunakan dalam mendeteksi manajemen laba adalah beban pajak tangguhan yang merupakan komponen pembentuk pada laporan laba rugi perusahaan.

Warfield (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan discretionary *accruals* sebagai ukuran *earnings management* dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba. Gabrielsen, *et al* (1997) menemukan hasil yang tidak signifikan hubungan antara kepemilikan manajerial dengan *earnings management*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada diatas, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba dengan mengajukan hipotesis:

H2: Kepemilikan Manajerial memperkuat hubungan antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

D. Kerangka Pemikiran

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direkayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan. Begitupun dengan aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Plesko (2002) dalam Phillips et al. (2003) mengungkapkan bahwa semakin besar perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen.

Artinya, semakin besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan mampu digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba pada perusahaan. Serta semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi pula kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan (Phillips et al., 2003).

Beban pajak tangguhan merupakan salah satu akun yang muncul pada laporan laba rugi sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang memiliki koreksi negatif lebih besar dibandingkan dengan koreksi positif. Beban pajak tangguhan juga merupakan nilai dari perubahan yang terjadi atas aktiva pajak tangguhan (*deffered tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) yang dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan tahun berjalan. Beban pajak tangguhan timbul sebagai

akibat adanya perbedaan waktu antara laba akuntansi (komersial) dengan laba fiskal.

Manajemen laba adalah pilihan metode akuntansi yang dilakukan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan atau menurunkan laba untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. Hal ini dilakukan oleh manajemen karena manajemen memiliki informasi yang lebih dibandingkan oleh *principal* sehingga manajemen dapat meningkatkan atau menurunkan laba untuk menarik pemegang saham. Kesenjangan informasi ini disebut asimetri informasi. Informasi tentang laba sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

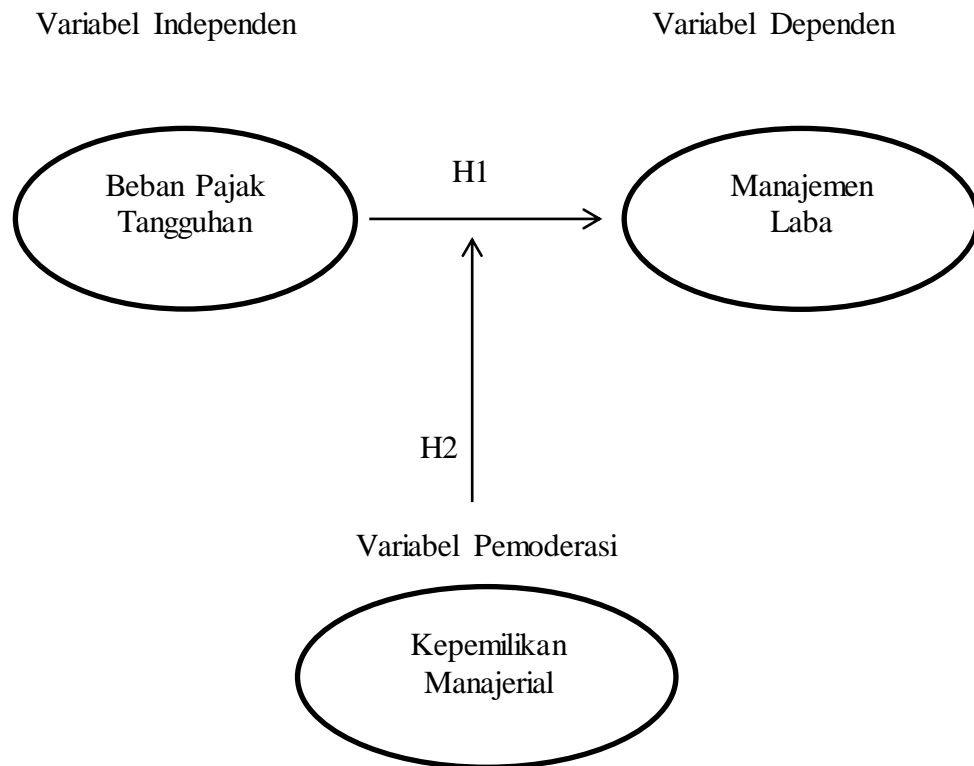
Kepemilikan manajerial merupakan suatu mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk dapat mengurangi manajemen laba. Dengan memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham, maka keinginan manajer untuk memaksimalkan kepentingan sendiri dengan melakukan manajemen laba akan berkurang. Hal ini dikarenakan manajer berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan prosedur akuntansi yang diambil perusahaan, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial maka manajemen laba yang dilakukan akan semakin berkurang karena manajer akan menanggung setiap keputusan yang diambil.

Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Phillips,

Pincus dan Rego (2003) dalam Yulianti (2005) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu (1) untuk menghindari penurunan laba dan (2) untuk menghindari kerugian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) variabel, yaitu variabel independen (X), variabel dependen (Y) dan variabel Pemoderasi. Variabel independen (bebas) adalah beban pajak tangguhan, variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini menggunakan manajemen laba serta variabel moderasi yaitu kepemilikan manajerial. Dari pemaparan di atas maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Sumber: Diolah Penulis